



e-ISSN3032-601X & p-ISSN3032-7105

Vol. 1, No. 2, Tahun 2024

# MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

# Journal of MISTER

Vol. 1, No. 2, 2024

Pages: 234-241

## Analisis Rekontruksi Organisasi dan Politik Pembangunan di Indonesia

Nabil Alwan, Eli Apud Saepudin, Mumun Komala Sari, Nanda Putra Pajar, Ria Purwasih

Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia

### Article in Journal of MISTER

|              |                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Available at | : <a href="https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister">https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister</a> |
| DOI          | : <a href="https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1457">https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1457</a>                     |

### How to Cite this Article

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APA          | : Alwan, N., Saepudin, E. A., Sari, M. K., Pajar, N. P., & Purwasih, R. (2024). Analisis Rekontruksi Organisasi dan Politik Pembangunan di Indonesia. <i>MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 1(2), 234 - 241. <a href="https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1457">https://doi.org/10.32672/mister.v1i2.1457</a> |
| Others Visit | : <a href="https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister">https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



## Analisis Rekontruksi Organisasi dan Politik Pembangunan di Indonesia

Nabil Alwan<sup>1\*</sup>, Eli Apud Saepudin<sup>2</sup>, Mumun Komala Sari<sup>3</sup>, Nanda Putra Pajar<sup>4</sup>,  
Ria Purwasih<sup>5</sup>

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang,  
Indonesia<sup>12345</sup>

Email:

[nabilalwan19@gmail.com](mailto:nabilalwan19@gmail.com)<sup>1</sup>, [eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id](mailto:eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id)<sup>2</sup>, [mumun6574@gmail.com](mailto:mumun6574@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nandaputrapajar05@gmail.com](mailto:nandaputrapajar05@gmail.com)<sup>4</sup>, [Purwasihria47@gmail.com](mailto:Purwasihria47@gmail.com)<sup>5</sup>

Diterima: 03-04-2024 | Disetujui: 04-04-2024 | Diterbitkan: 05-04-2024

### ABSTRACT

*Development in Indonesia has undergone various transformations and reconstructions since independence. This reconstruction involved changes in organizational structures and the underlying political system. Impact of Reconstruction on Development: Progress: Poverty alleviation and improved public welfare, Rapid economic growth especially in the New Order era, Development of democracy and public participation. Challenges: Economic inequality and social disparities remain high, Quality of education and health still needs to be improved, Environmental degradation and climate change.*

**Keywords:** Organization; Public; Development; Politic; Social.

### ABSTRAK

Pembangunan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi dan rekonstruksi sejak kemerdekaan. Rekonstruksi ini melibatkan perubahan struktur organisasi dan sistem politik yang mendasarinya. Dampak Rekonstruksi terhadap Pembangunan: Kemajuan: Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pertumbuhan ekonomi yang pesat terutama di era Orde Baru, Pengembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Tantangan: Kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial masih tinggi, Kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan, Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

**Katakunci:** Organisasi; Publik; Pembangunan; Politik; Sosial.

## PENDAHULUAN

Bagian Analisis rekonstruksi organisasi dan politik pembangunan di Indonesia melibatkan pemahaman tentang perubahan struktural, kebijakan dan dinamika politik yang mempengaruhi proses pembangunan di Indonesia. Sejarah Pembangunan melihat bagaimana pembangunan berkembang sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Periode-periode penting termasuk era Soekarno, Orde Baru di bawah Soeharto, pasca reformasi 1998, dan periode pembangunan saat ini. Struktur Organisasi Pembangunan menganalisis struktur lembaga dan badan yang terlibat dalam proses pembangunan, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kebijakan Pembangunan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan sektoral seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Partisipasi Politik dalam Pembangunan menganalisis bagaimana partisipasi politik dari berbagai pihak, termasuk partai politik, LSM, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya, mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan pembangunan.

Teori sumber daya manusia harus digunakan sebagai pemikiran ke arah perubahan sikap dan pandangan bangsa sebagai konsekuensi manusia sebagai individu dalam hubungannya dengan masyarakat nasional dan internasional. Secara strategis, karakteristik budaya organisasi sumber daya manusia Indonesia harus dapat mendukung pelaksanaan kemajuan pembangunan melalui kemampuan yang terukur dengan memiliki kapasitas kewirausahaan terorganisir yang menjadikan sumber daya manusia Indonesia sebagai "sharing model" dan agen perubahan dari rekonstruksi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai nilai luhur karakter positif bangsa Indonesia. (Mulyaningih, 2020).

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) "Negara Indonesia adalah negara hukum". Seperti yang dikemukakan oleh Sthal (bahwa sebagai negara hukum harus memenuhi beberapa unsur diantaranya (Maubezi, 2017):

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar manusia (perlindungan terhadap hak asasi manusia);
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan tertulis (asas legalitas); dan
- d. Adanya peradilan administrasi.

Kerja sama adalah seperangkat hubungan yang mapan dan sah di dalam Hukum, misalnya di dalam organisasi atau lembaga internasional. Kolaborasi terjadi karena adanya perubahan perilaku dari para aktor sebagai reaksi dan antisipasi atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh aktor lain. Kolaborasi dapat terjadi melalui proses negosiasi. Kerja sama juga dapat muncul dari komitmen pribadi terhadap kesejahteraan umum atau pemenuhan kebutuhan pribadi. Bagian penting dari perilaku kerja sama adalah aktivisme, sejauh mana setiap orang percaya bahwa pihak lain adalah mitra yang menguntungkan. Teori kerja sama merupakan realisasi dari kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan kerja sama, seperti berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan bereksperimen sendiri atau bersama-sama untuk berkompetisi (Putri, 2019).

Pembangunan pertama kali digunakan dalam arti pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat dianggap berhasil melaksanakan pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap

tahunnya. (Rochajat: 2011:3). Dengan sistem desentralisasi yang dianut oleh orientasi pembangunan di Indonesia saat ini, maka pembangunan daerah juga menjadi bagian utama dalam konsep pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Supriyadi (2004:5).

Bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak dari pergeseran nilai-nilai saat ini dan ke depannya memiliki karakteristik budaya organisasi yang bermuara dari falsafah negara yang telah memiliki, dipahamkan mampu membangun pada tataran perubahan cara berpikir, bertindak yang mengarah ke lebih agresif yaitu dengan rekontruksi secara fundamental sesuai selaras dengan karakter bangsa Indonesia yang menginginkan *loquacity* (kesukaan bicara), *hierarchy* (hirarkhis), *desire to please* (keinginan menyenangkan pihak lain), *Family* (kekeluargaan), *no work ethic in the Protestant sense* (etika kerja yang tak „ngotot“), *age is respected* (menghargai yang lebih tua), *face saving* (tak mau kehilangan muka), *courtesy* (rasa hormat), *gentleness* (lemah lembut), *friendly hospitality* (ramah), *unity and conformity* (kesatuan dan kemufakatan), *avoidance of confrontation* (Menghindari konfrontasi), *adat customary law usually prevails over Islam*, walaupun terdapat kekurangan yaitu memiliki sifat Munafik, Enggan bertanggung jawab, Berjiwa feodal, Percaya tahayul, dan Bertaqwa. Adapun sifat lemah Indonesia dalam hal ini seyogyanya harus dilengkapi dengan karakteristik budaya "Berbagi" (*sharing*) selain sebagai penyeimbang juga merupakan alat dan landasan kedepan pada saat Indonesia akan menghadapi "Indonesia Culture Future Shock" mengingat karakteristik "Berbagi" (*Sharing*) merupakan jelmaan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesiadalam Pancasila yang sudah ada sejak lama yang terimplementasi dalam kehidupan bangsa Indonesiaseperti Silih Simbeuh di tataran Jawa Barat, memang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat bahkan orang sunda pada umumnya. (Kusnaka, UNPAS : 2001)

Aspek ontologi ilmu ekonomi misalnya adalah barang dan jasa. Aspek ontologi ilmu sosial (sosiologi) adalah kekerabatan antar manusia, dan aspek ontologi ilmu fisika adalah materi dan gas. Ontologi berarti obyek-obyek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Lalu, bagaimana dengan ilmu politik?. Secara ontologis, politik juga memiliki obyek-obyek kajian yang spesifik. Miriam Budiardjo menyebutkan sekurang-kurangnya ada lima obyek ontologis ilmu politik, yaitu: 1. Negara (*state*), yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya; 2. Kekuasaan (*power*), yaitu kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku; 3. Pengambilan keputusan (*decision-making*) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif keputusan mulai dari proses sampai keputusan itu dicapai; 4. Kebijakan umum (*public policy*), yaitu cara yang ditempuh dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang membuat kebijakan memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya; 5. Pembagian (*distribution*) nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang berharga dan penjabatan dari nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat, yang pada galibnya kerap tidak merata dan akhirnya melahirkan konflik. (Miriam Budiardjo, 1982).

Pada negara Indonesia sendiri, keberadaan partai politik mempunyai peran penting dalam sistem pemerintahan. Keberadaan partai politik tidak sekadar sebagai "tukang stempel" pemerintah, melainkan memiliki tugas dan fungsi strategis dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi politik untuk mengusung calon dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah. Kekuatan yang dimiliki partai politik ini menghadirkan kontestasi politik di lingkup eksekutif dan legislatif yang tak jarang kemudian menimbulkan perselisihan internal partai seperti pemecatan secara sepihak, pencopotan jabatan, penerbitan keputusan organisasi partai yang tidak prosedural, hingga penyalahgunaan wewenang pengurus. (M. Anwar Rachman, 2016).

Kini salah satu persoalan mendesak berkaitan dengan masalah pembangunan di era reformasi adalah upaya mengintegrasikan perbedaan-perbedaan etnis tersebut dalam bingkai multikulturalisme. Merupakan kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga secara sederhana negara-bangsa Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Pasca-reformasi, realitas multikultural tersebut dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi integrating force yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya. (Mahfud Choirul, 2006).

Indonesia adalah negara hukum di mana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian yaitu secara horizontal dan vertikal. Konsep dasarnya negara hukum adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda yang disebut trias politica (Farkhani, dkk, 2018: 189). Karena dengan tidak adanya inovasi kerja yang baik di parlemen anggota pemerintahan legislatif akan menimbulkan kehancuran di lembaga dan kepercayaan masyarakat. Apa lagi tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif yang menimbulkan permasalahan baru bagi calon anggota legislatif yang akan maju di pemilu karena baginya terlalu berat ketika melawan orang yang sudah berkali-kali menjabat di Legislatif (Supriadi, 2020).

Indonesia telah melalui berbagai perubahan-perubahan politik antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik tersebut, maka karakteristik produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, dan sebaliknya saat konfigurasi politik tampil secara otoriter maka produk hukum yang dihasilkan berkarakter ortodoks. Hukum sebagai produk politik sangat ditentukan oleh perubahan politik. Hal ini dapat dilihat dari situasi pada saat Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto jatuh, maka hukum juga langsung diubah terutama hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Berbagai undang-undang di bidang politik produk orde baru langsung diubah dengan pembongkaran atas asumsi-asumsi serta penghilangan atas kekerasan-kekerasan politik yang menjadi muatannya. (Moh. Mahfud MD, 2009).

Dalam konteks pembangunan hukum pasca reformasi, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa sebagai hasil kompromi reformasi dan dialektika politik serta hukum, perkembangan penyusunan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga perkembangan. Pertama, peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan dengan IMF. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan November 1998. Ketiga, berdasarkan perundang-undangan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (Romli Atmasasmita, 2001). Suatu perubahan konfigurasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat yang bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Sekadar menunjuk contoh, di Inggris komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan konfigurasi sosial-politik berupa Revolusi Industri abad ke-18 dan 19 tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada

sebelumnya, melainkan perlu direspons dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh parlemen. (John Alder, 1989).

Gejala umum yang seringkali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara. Kekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang “dipaksa” harus berbagi dengan kekuatan lain, khususnya parlemen, mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak terelakkan. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban dan pola kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena acap kali pembentukannya tidak dilandasi dengan kebutuhan yang rasional dan landasan yuridis yang cukup. Sebagai lembaga independen yang terlepas dari hubungan struktural dengan pemerintah, pemerintah tentu tidak berada dalam kapasitasnya untuk bisa mengontrol secara khusus terhadap lembaga-lembaga ekstra tersebut. (A. Ahsin Thohari, 2006).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode literature review. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2018). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berguna untuk menjelaskan situasi yang terjadi dalam kehidupan sosial dan relevan dengan lebih dari satu variabel penelitian atau masalah penelitian (Mulyadi, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejarah Pembangunan melihat bagaimana pembangunan telah berevolusi sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Periode-periode penting termasuk era Soekarno, Orde Baru di bawah Soeharto, reformasi pasca-1998, dan periode pembangunan saat ini. Struktur Organisasi Pembangunan menganalisis struktur lembaga dan badan yang terlibat dalam proses pembangunan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau di Indonesia, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan regional. Pengaruh Global menyelidiki bagaimana faktor-faktor global seperti investasi asing, perdagangan internasional, dan kerja sama pembangunan dengan organisasi internasional mempengaruhi pembangunan di Indonesia. Teknologi dan Inovasi menganalisis peran teknologi dan inovasi dalam mempercepat pembangunan, termasuk upaya untuk mengadopsi teknologi baru dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian, manufaktur, dan infrastruktur. Analisis yang komprehensif tentang rekonstruksi organisasi dan politik pembangunan di Indonesia membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek ini serta hubungan timbal balik di antara mereka. Selain itu, pengamatan terhadap perubahan-perubahan baru dan tren yang berkembang dalam konteks domestik dan global juga sangat penting. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pertumbuhan ekonomi yang pesat

terutama di era Orde Baru, Perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Tantangan: Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang masih tinggi, Kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, Degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Rekonstruksi organisasi dan politik pembangunan di Indonesia telah menghasilkan kemajuan yang signifikan, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya. Hal ini telah menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Organisasi masyarakat sipil (OMS) telah memainkan peran yang semakin penting dalam pembangunan di Indonesia. OMS telah terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti advokasi kebijakan, penyediaan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia.

Jika Analisis rekonstruksi organisasi dan politik pembangunan di Indonesia menunjukkan beberapa hasil utama:

1. Desentralisasi:

Penerapan desentralisasi sejak tahun 1999 telah membawa perubahan signifikan dalam struktur organisasi dan politik pembangunan di Indonesia. Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di wilayahnya. Hal ini telah menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

2. Demokratisasi:

Reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 telah membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam proses pembangunan.

3. Penguatan organisasi masyarakat sipil:

Organisasi masyarakat sipil (OMS) telah memainkan peran yang semakin penting dalam pembangunan di Indonesia. OMS telah terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti advokasi kebijakan, penyediaan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi organisasi dan politik pembangunan di Indonesia telah membawa beberapa kemajuan penting. Desentralisasi, demokratisasi, dan penguatan OMS telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Indonesia. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu di Timpangkan:

-Ketimpangan: Ketimpangan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah besar di Indonesia.

-Korupsi: Korupsi masih merupakan hambatan utama bagi pembangunan di Indonesia.

-Kapasitas: Kapasitas pemerintah daerah dan OMS masih perlu diperkuat.

## KESIMPULAN

Pembangunan di Indonesia menunjukkan beberapa hal penting, yaitu: Desentralisasi, Reformasi 1998 membawa desentralisasi yang signifikan, namun masih terdapat hambatan dalam implementasi dan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Kapasitas organisasi, Kapasitas organisasi pemerintah dan non-pemerintah masih perlu ditingkatkan untuk mengelola pembangunan secara efektif. Keterlibatan

masyarakat, Perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perlu didorong dan diperkuat. Demokratisasi, Demokratisasi di Indonesia telah mengalami kemajuan, namun tantangan seperti korupsi, politik uang, dan oligarki masih ada. Stabilitas politik, Stabilitas politik secara umum terjaga, namun polarisasi politik dan isu SARA masih menjadi ancaman potensial. Kepemimpinan, Kepemimpinan yang kuat dan visioner diperlukan untuk mengarahkan pembangunan nasional. Pembangunan, Kesenjangan, Kesenjangan ekonomi, sosial, dan antardaerah masih menjadi masalah utama yang perlu diatasi. Pembangunan infrastruktur, Pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Sumber daya manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa rekonstruksi organisasi dan politik pembangunan di Indonesia masih dalam proses dan membutuhkan upaya yang berkesinambungan dari semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Farida, *REKONSTRUKSI BADAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK: STUDI KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA* <[https://nasional.sindonews.com/read/380842/12/demokrat-ahy-tuding->](https://nasional.sindonews.com/read/380842/12/demokrat-ahy-tuding-)
- Bagus, Adityadarma, *ANALISIS PERKEMBANGAN LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF POST-REFORM STATE INSTITUTIONS IS REVIEWED FROM A LEGAL POLITICAL PERSPECTIVE* <[https://jhlgl.rewangrencang.com/>](https://jhlgl.rewangrencang.com/)
- Dahwir, Ali, and Riwayat Artikel, 'Urgensi Rekonstruksi Strafsoort Dalam Hukum Pidana Indonesia (Urgent Reconstruction Strafsoort in Indonesia's Criminal Law)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1.2 (2022), 87–100 <<https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.864>>
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', *Ius Constituendum* |, 4 (2019), 147
- Jayanto, Dian Dwi, 'MEMPERTIMBANGKAN FENOMENA POPULISME ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERTARUNGAN DISKURSIF : KONTESTASI WACANA POLITIK ANTARA GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA ( GNPf-ULAMA ) DAN NAHDLATUL ULAMA ( NU ) Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesi', 29.1 (2019), 1–25 <<https://doi.org/10.22146/jf.41131>>
- Kurniawati, Eka, 'Subordinasi Perempuan : Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia'
- Munatama, Anisya, and Kiki Zhaidah, *ANALISIS KERJASAMA BILATERAL SOSIAL POLITIK CHINA DAN INDONESIA DALAM MASA KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO 2014-2020*, *Jurnal Artefak*, 2023, x <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/9283>>
- Nugraha, Riko, *REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN USAHA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA*, 2020, xi
- Nur, Muhammad, *Asy-Syir'ah REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI POLITIK : DARI HUMANISTIK KE PROFETIK*, *Jurnal Ilmu Syari' Ah Dan Hukum*, 2014, XLVIII
- P2M STKIP Siliwangi *REKONTRUKSI KARAKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI DI INDONESIA*

- DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (PERSIAPAN MENGHADAPI ASIA FUTURE SHOCK 2020)* Mulyaningsih
- Setiawan, Deny, *POLITIK MULTIKULTURAL ETNIS TIONGHOA PASCA-REFORM ASI DI KOTA MEDAN (MULTICULTURAL POLITICS OF CHINESE A T POST-REFORM IN MEDAN)*
- Suhaimi, Abdurrahman, and Muhammar Amin, 'Pendidikan Politik Dakwah Organisasi Masyarakat ( Studi Analisis Konsep Dan Komunikasi Dakwah Organisasi Masyarakat )'
- Suhendra, Ahmad, Rekonstruksi Peran, Dan Hak Perempuan, and Sunan Kalijaga, *REKONSTRUKSI PERAN DAN HAK PEREMPUAN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM*
- Syamsudin, M, Sahabat Komisi, and Yudisial Kota Salatiga, 'REKONSTRUKSI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA', *Journal of Indonesian Law*, 2.2 (2021), 125–61 <<https://doi.org/10.18326/jil.v2i2>>
- Yuningsih, Ani, *REIDENTIFIKASI BUDAYA ORGANISASI MELALUI PENDIDIKAN KEHUMASAN \**, *Oktober-Desember*, 2004